

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjuangan Muslim Islam Patani di Thailand Selatan berakar dari penaklukan kerajaan Siam atas kerajaan Patani. Semenjak itu, Patani tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka, akan tetapi menjadi kerajaan jajahan Siam. pada saat itu Patani dikenakan bermacam-macam jenis eksploitasi dari kerajaan Siam.

Perjuangan umat Islam terhadap pemerintahan Thai muncul sebagai akibat aakomodasi secara paksa (*coercion*) oleh pemerintah Thai terhadap masyarakat Patani yang mengakibatkan konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Tujuan perjuangan yang dilakukan mengalami perubahan, yang dimulai dengan menuntut otonomi dan berubah untuk memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan karena untuk memperoleh otonomi tidak mungkin, maka mereka berjuang untuk merdeka dengan melakukan perjuangan bersenjata menentang pemerintah.

Perjuangan yang dilakukan oleh Muslim Patani semenjak tahun 1947 hingga 2012 mengalami beberapa perubahan, seperti perjuangan dari menuntut otonomi sampai menuntut kemerdekaan, dari perjuangan yang bersifat lunak hingga perjuangan dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Perjuangan tersebut mengalami pasang surut dan mendapat berbagai tantangan, baik

tantangan dari pihak luar seperti pemerintah Thai, maupun tantangan dari dalam, seperti adanya pengkhianat dalam perjuangan dan kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Muslim Patani.

Munculnya kembali konflik antara pemerintah Thai dengan pejuang Muslim Patani disebabkan karena adanya sikap saling tidak percaya antara keduanya, walaupun sudah dilakukan perjanjian damai pada tahun 2008. Di satu sisi, pemerintah terus menjaga keamanan di wilayah Thailand Selatan dan mengakibatkan pembunuhan kepada warga masyarakat. Di sisi lain, pihak pejuang menanggapi sikap pemerintah Thai terhadap janji-janji yang disampaikan kepada para pejuang dan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan memajukan wilayah tersebut.

Semenjak perjanjian damai tahun 2008 dilakukan, telah merebak isu-isu tentang perjuangan Muslim Patani. Isu tersebut tentang separatis, teroris, jihad, dan kepemimpinan. Hal tersebut disebabkan kemajuan media komunikasi, khususnya internet, di mana semua orang bisa mengeluarkan berbagai pendapat dan bebas untuk mendapatkan berbagai informasi. Namun, para pejuang terus melakukan perjuangan dengan menarik dukungan dan simpati rakyat, berjuang dengan mengangkat senjata, dan yang tak kalah pentingnya adalah berjuang melalui parlemen. Dalam hal ini, perjuangan terus dilakukan hingga apa yang dicita-citakan tercapai.

Menanggapi perjuangan yang dilakukan, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meredam situasi konflik yang terjadi. Kebijakan tersebut dalam bentuk meluncurkan rencana pembangunan, memberikan uang

kepada penduduk, melaksanakan perundingan dengan pihak pejuang, serta meminta mediasi pihak ketiga. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang ingin agar negara Thailand menjadi lebih baik di mata internasional.

## **B. Saran**

Melalui karya tulis ilmiah ini, penulis menyarankan :

1. Masalah umat Islam Patani perlu mendapatkan perhatian yang serius dari dunia Internasional, khususnya dari OKI dan ASEAN. Apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka masalah mereka akan terkesan tiada artinya.
2. Sebagai umat Islam yang diikat oleh rasa persatuan dan persaudaraan melalui tali akidah Islam, maka sudah sepantasnya kita menggalang kekuatan untuk menolong umat Islam Patani, baik dengan bantuan moril maupun materil.
3. Perjuangan yang tepat untuk masa saat ini adalah berjuang mencerdaskan kehidupan masyarakat Patani melalui pendidikan yang berkualitas serta berjuang dalam sistem politik negara Thailand.
4. Kepada umat Islam Patani, agar jangan banyak yang mengungsi ke Malaysia atau negara-negara tetangga. Apabila banyak yang mengungsi, maka dikhawatirkan penduduk di daerah tersebut akan semakin berkurang dan perjuangan tidak akan mencapai keberhasilan.

5. Kepada pemerintah Thailand, agar memberikan hak-hak umat Islam Patani.  
Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah sebuah negara yang harus melindungi hak-hak warga negaranya.
6. Kepada kedua pihak yang bertikai (Pemerintah Thai dan pejuang Muslim Patani), bila ingin menyelesaikan persoalan dengan jalan perundingan, hendaklah melibatkan semua pihak yang terkait dengan persoalan yang terjadi. Selain itu, harus ada keterbukaan dan keikhlasan untuk menerima segala persetujuan yang telah dibuat.